

**LAPORAN
EVALUASI IMPLEMENTASI
IT MASTER PLAN 2010 - 2014**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peranan teknologi informasi dirasakan semakin penting dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pemerintahan dewasa ini. kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik dan benar. Keberadaan dokumen IT Master Plan merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam upaya mengelola dan mengembangkan teknologi informasi dalam lingkup pemerintah kota ke arah yang benar.

Untuk mewujudkan hal tersebut pada akhir tahun 2009 Pemerintah Kota Banda Aceh membuat suatu rencana induk/ master plan penerapan teknologi informasi untuk ruang lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh. Master plan yang pembuatannya dibantu oleh BPPT tersebut berlaku selama lima tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Dokumen ini kini telah habis masa berlakunya dan memerlukan adanya suatu evaluasi menyeluruh terhadap implementasi rencana tersebut untuk kemudian dibuat revisi dokumen yang baru.

Adanya kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) oleh pemerintah pusat juga telah membuat dokumen revisi ITMP semakin mendesak untuk dapat segera diselesaikan, dimana salah satu poin penilaian baik tidaknya manajemen TI di suatu pemerintahan adalah adanya dokumen rencana induk tata kelola TI di daerah tersebut yang valid dan masih berlaku.

1.2 Tujuan evaluasi

Tujuan utama dari evaluasi ITMP ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem tata kelola TIK yang ada dalam lingkup pemerintah Kota Banda Aceh sejalan dengan apa yang telah direncanakan dalam dokumen ITMP, serta menilai tingkat perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari prosentase hasil evaluasi ketiga aspek perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai indikator berhasil atau tidaknya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan perencanaan yang tertera dalam dokumen ITMP sebelumnya dalam kurun waktu 2010 - 2014.

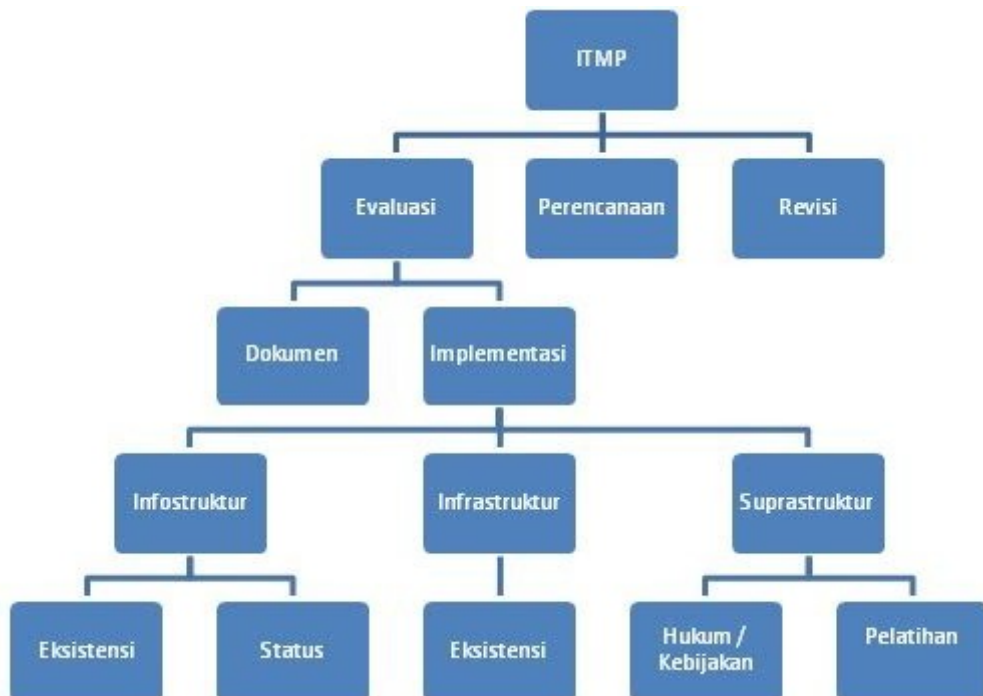
Secara umum, kegiatan evaluasi ITMP ini akan menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan dalam pembuatan/revisi dokumen perencanaan berikutnya. Kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam penerapan perencanaan ITMP 2010-2014 dan permasalahan yang ditemukan dalam mengimplementasikan perencanaan tersebut diharapkan bisa menjadi informasi dasar dalam pengembangan dokumen perencanaan berikutnya.

II. EVALUASI

2.1 Metode Evaluasi

Proses evaluasi ITMP difokuskan pada tingkat implementasi terhadap perencanaan yang terdapat dalam dokumen ITMP 2010-2014. Dalam evaluasi ini prosentase tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan yang telah direalisasikan akan dibandingkan dengan data perencanaan yang tertera dalam dokumen ITMP 2010-2014. Dalam hal ini terdapat 3 aspek yang menjadi acuan evaluasi, yaitu data perencanaan infostruktur, infrastruktur, dan suprastruktur IT di Banda Aceh.

Evaluasi ketiga aspek tersebut dilakukan dengan metode survei yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh. Secara umum struktur evaluasi ITMP ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini



Gambar 1. Struktur kegiatan evaluasi

2.2 Hasil Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat implementasi/penerapan ITMP terkait 3 aspek perencanaan; infostruktur, infrastruktur, dan suprastruktur, dengan menggunakan data dasar perencanaan yang terdapat dalam lampiran dokumen ITMP 2010 - 2014.

Evaluasi Infostruktur berfokus pada ada tidaknya sistem informasi yang telah direncanakan, dan sesuai atau tidaknya kepemilikan dan pengelolaan seperti yang tertera dalam dokumen. Sebagai pelengkap informasi yang juga dibutuhkan dalam pengembangan dokumen master plan berikutnya,

maka status dari setiap aplikasi yang telah ada juga dimasukkan ke dalam struktur evaluasi infostruktur.

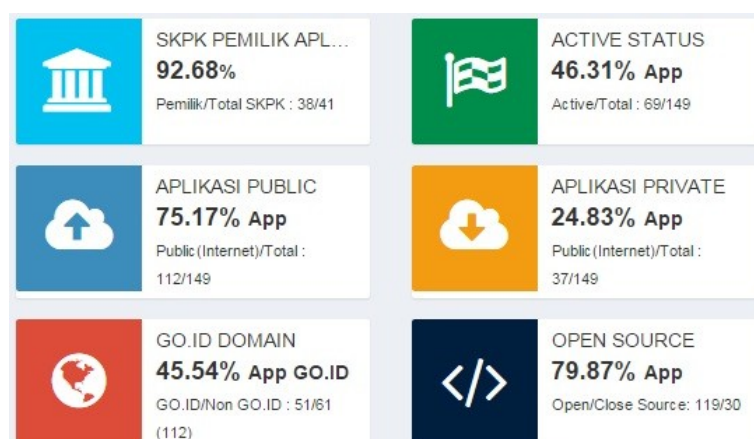
Evaluasi infrastruktur dan suprastruktur berfokus kepada berjalan atau tidaknya rencana kegiatan/pembangunan yang telah direncanakan. Meskipun dalam dokumen perencanaannya memuat aspek waktu, namun hasil wawancara dengan pihak terkait terdapat beberapa informasi tentang pelaksanaan perencanaan tanpa dilengkapi dengan informasi tentang waktu pelaksanaan ataupun informasi penunjang lainnya. Sehingga dalam hal ini, evaluasi akan didasarkan pada eksistensi pelaksanaan perencanaan saja.

A. Infostruktur

Merujuk pada lampiran ITMP 2010 - 2014 terkait dengan perencanaan pengembangan infostruktur, terdapat 33 Sistem Informasi (SI) dan database yang direncanakan akan dikembangkan dalam lingkup Pemerintahan kota Banda Aceh. Setiap SI dilengkapi dengan keterangan lebih lanjut berupa nama instansi pemilik dan pengelola dari masing-masing SI tersebut.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh DISHUBKOMINFO terhadap sistem informasi (aplikasi) yang dimiliki oleh SKPK, ditemukan bahwa jumlah aplikasi yang telah dikembangkan mencapai 149 aplikasi, dengan rincian 69 aplikasi berstatus aktif, 68 aplikasi dalam fase pengembangan, dan 12 aplikasi lainnya berstatus disavowed, dimana kepemilikan aplikasi tersebut tidak diakui oleh SKPK manapun. Dari kesemua aplikasi ini, 112 diantaranya bisa diakses secara terbuka oleh publik, sedangkan 37 lainnya adalah aplikasi private, yang peruntukannya hanya bisa diakses oleh internal SKPK pemilik aplikasi saja. Daftar aplikasi ini secara lengkap dapat dilihat pada situs <http://layanan.bandaacehkota.info>.

Jika dibandingkan dengan data perencanaan yang ada, maka akan terlihat bahwa jumlah yang banyak dari aplikasi tersebut belum juga dapat memenuhi keseluruhan dari item infostruktur yang disyaratkan dalam dokumen ITMP. Dalam dokumen perencanaan, infostruktur dibagi dalam 33 Sistem Informasi (SI), dimana setiap SI bisa berisikan beberapa aplikasi, dilengkapi juga dengan data kepemilikan SI dan pengelola. Namun dari 149 aplikasi yang telah dikembangkan tersebut, hanya memenuhi sebanyak 27 SI dari 33 SI yang disyaratkan atau sebesar 81.82%.



Gambar 2. Gambaran kondisi terkini aplikasi

Jika dilihat dari kesesuaian kepemilikan dengan perencanaan, 23 SI atau 69.70% diantaranya sesuai dengan perencanaan yang ada, sedangkan 30.3% lainnya dimiliki oleh instansi lain, atau tidak diakui kepemilikannya oleh instansi manapun. Untuk kesesuaian pengelolaan, 17 SI

atau 51.52 % dari SI yang ada dikelola oleh instansi yang sesuai, sedang 49.48% lainnya dikelola oleh instansi lain. Secara terperinci, data evaluasi sistem informasi ini dapat dilihat pada lampiran infostruktur.

Data-data ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana pengembangan infostruktur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup baik, namun dalam pengembangannya ITMP tidak dijadikan panduan. Sehingga dalam pelaksanaannya setiap instansi terus mengembangkan aplikasi yang mereka butuhkan, tanpa merujuk pada perencanaan yang telah lebih dahulu dibuat.

B. Infrastruktur

Perencanaan infrastruktur terlampir dalam ITMP dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori; kebijakan dan pengembangan infrastruktur. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam proses evaluasi infrastruktur terdapat banyak kekurangan informasi pelaksanaan serta tidak adanya standard keberhasilan yang terstruktur, oleh karena itu evaluasi hanya akan difokuskan kepada ada tidaknya pelaksanaan terhadap perencanaan.

Secara total ada 11 perencanaan untuk kategori pengembangan infrastruktur, ada 4 kebijakan terkait IT yang diharapkan sudah akan ada dalam kurun waktu 2010 - 2014, namun hingga laporan ini dibuat di penghujung tahun 2015, tak satupun dari kebijakan IT yang dimaksud dalam dokumen ITMP telah disahkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Ketiadaan kebijakan, misalnya kebijakan TI tentang Government Data Management Center dan Government Data Recovery center, ditengarai ikut berperan dalam terhalangnya pembangunan, migrasi dan pengembangan Government Data Manajemen Center.

Poin-poin yang menjadi item dalam perencanaan infrastruktur secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi tata kelola TI di Pemerintah Banda Aceh

Dalam dokumen ITMP tidak dijelaskan secara mendetail terkait optimalisasi tata kelola TI ini. Dokumen tersebut juga tidak memuat indikator-indikator yang dapat dipakai dalam menilai item optimalisasi, sehingga kegiatan apapun yang berkaitan dengan pengembangan TI dalam lingkup Pemerintah Banda Aceh dianggap sebagai usaha untuk mengoptimalkan proses tata kelola TI di Pemerintah Banda Aceh.

Bergerak dari asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa item optimalisasi ini telah terlaksana. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkembangan yang dicapai dalam bidang TI, seperti jumlah aplikasi, peningkatan jumlah server, cakupan jaringan, jumlah IP Publik, dsb. Beberapa bentuk optimalisasi tata kelola TIK yang terlihat adalah sbb:

a. Server

Jumlah server sampai September 2015 adalah 68 server untuk 13 SKPK dan 9 kecamatan yang ada dalam lingkup Kota Banda Aceh, dari sebelumnya hanya ada 16 server pada tahun 2010. Jika dilihat dari prosentase, jumlah ini meningkat sekitar 76.5 % dibandingkan pada tahun 2010. 53 diantara server-server tersebut dalam keadaan aktif, 13 unit tidak aktif, baik itu server dalam keadaan baik namun belum dioperasikan ataupun kondisi rusak sehingga tidak bisa digunakan. Sedangkan 2 unit lainnya merupakan bagian dari perencanaan yang akan segera dilaksanakan pengadaannya dan sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan.

Rincian tentang SKPK pemilik, jumlah server, dan sumber pengadaan server dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

No	SKPK	Jumlah Server	Sumber
1	Dishubkominfo	9	Hibah BPDE (1), OTSUS (4), APBK (4)
2	PDAM Tirta Daroy	2	PDAM (2)
3	Disdukcapil	4	Hibah Adminduk (2), APBK (2)
4	9 Kecamatan	9	APBN (4), Hibah Disdukcapil (4) Hibah Adminduk (1)
5	DKPP	1	APBK
6	BKPP	3	APBK
7	Disdikpora	8	APBK
8	Disbudpar	3	OTSUS
9	DPKAD	5	APBK
10	Setda	16	APBK (9), Hibah BBPT (1) Hibah GTZ (4), APBK bagian umum (1), APBK bagian ekonomi (1)
11	Bappeda	5	APBK (2), Hibah GTZ (1) Belum beli - APBK perubahan (2)
12	RSU Meuraxa	2	BLUD
13	Dinkes	1	OTSUS
14	Baitulmal	1	APBK

Tabel 1. Keadaan server hingga September 2015

b. IP publik

IP publik yang telah ada saat ini berjumlah sebanyak 59 IP publik yang tersebar pada 5 SKPK. Serupa dengan pengadaan server, sumber pengadaan ip publik juga sebagian besar berasal dari dana APBK dengan rincian 32 ip publik ditempatkan di Setda, 5 di Bappeda kota Banda Aceh, dan 2 di disdikpora. IP publik lainnya berasal dari bantuan BPDE Dishubkomintel provinsi Aceh yang kesemuanya ditempatkan di Dishubkominfo, sedang 2 lainnya yang ada di PDAM tirta daroy berasal dari sumber dana PDAM sendiri.

No	SKPK	Jumlah	Sumber
1	Dishubkominfo	16	Bantuan BPDE Dishubkomintel Prov Aceh
2	PDAM Tirta Daroy	1	PDAM Tirta Daroy
3	Disdikpora	2	APBK
4	Setda	32	APBK
5	BAPPEDA	5	APBK

Tabel 2. Sebaran IP Publik dan sumber dananya

2. Adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemko Aceh

Tidak terlaksana.

3. Kebijakan TI tentang government Data management center dan government data recovery center

Tidak terlaksana.

4. Kebijakan pengamanan konten di wilayah Pemko Banda Aceh kepada operator yang melayani pemerintah dan masyarakat Banda Aceh, sehubungan dengan akan dijadikan nya kota Banda Aceh sebagai kota wisata islami dan kota pendidikan

Tidak terlaksana.

5. Kebijakan dan implementasi integrasi data untuk layanan masyarakat dan pelaporan eksekutif

Tidak terlaksana.

6. Pembangunan, migrasi, dan pengembangan government data management center

Tidak terlaksana.

7. Pengembangan Jaringan WAN dengan MPLS

Perencanaan ini disimpulkan telah berjalan mengingat pembangunan jaringan dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah mendukung Multi Protocol Layer System (MPLS) sebagai sarana komunikasi antar SKPK.

8. Pengembangan LAN di setiap SKPD

Dalam dokumen ITMP versi 2010-2014 tidak dijelaskan mengenai indikator yang dapat dipakai untuk mengukur standar keberhasilan pengembangan LAN ini, sehingga usaha sekecil apapun untuk mengembangkan jaringan LAN di suatu SKPK/D dianggap telah memenuhi unsur item perencanaan ini. Dengan demikian perencanaan ini disimpulkan telah berjalan.

9. **Pembangunan Pemko Banda Aceh Backbone dengan BWA**

Item jaringan ini merupakan salah satu yang mengalami peningkatan yang cukup pesat dari perangkat TI yang ada di Banda Aceh. Pada tahun 2013 tercatat ada 8 SKPK di Banda Aceh yang terkoneksi secara wireless menggunakan media radio. Kemudian hingga pertengahan tahun 2015 terdapat tambahan 12 SKPK/ sederajat yang terkoneksi dengan media radio, dan diperkirakan pada akhir 2015 atau awal 2016 seluruh SKPK di Banda Aceh telah terkoneksi secara wireless menggunakan media radio. Daftar SKPK di Banda Aceh yang telah terkoneksi secara wireless dapat dilihat pada tabel 3 dibawah.

No.	SKPK	No.	SKPK
1.	Dishubkominfo dan 5 UPTD	11.	BPM
2.	Balaikota	12.	Inspektorat
3.	Dinkes dan 11 UPTD	13.	Camat Kuta Raja
4.	Dinas PU	14.	RSU Meuraxa
5.	Dinas Kebersihan (DKKP)	15.	Baitulmal
6.	Dinas Kelautan (DKPP)	16.	Kantor Lingkungan Hidup
7.	Disdikpora	17.	Camat Ulee Kareng
8.	Disbudpar	18.	Camat Meuraxa
9.	Disperindagkopmukm dan 1 UPTD	19.	MPU
10.	Dinas Syariat Islam		

Tabel 3. Coverage jaringan radio antar SKPK di Banda Aceh

10. **Evaluasi dan update ITMP**

Proses evaluasi ITMP versi 2010-2014 masih dalam proses pengerjaan. Setelah proses evaluasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan membuat update/revisi untuk dokumen ITMP yang baru untuk periode berikutnya.

11. **Pemenuhan kebutuhan perangkat IT di seluruh SKPD Pemko Banda Aceh**

Kondisi ideal dari perangkat IT yang dirancang dalam ITMP adalah setiap komputer dapat dioperasikan oleh 3 pegawai, dan setiap printer yang ada akan dapat diakses oleh 10 komputer.

Pada tahun 2010, jumlah pegawai yang ada mencapai 9.195 pegawai baik PNS maupun non PNS. Untuk jumlah pegawai tersebut tersedia 420 komputer dan 228 printer. Merujuk pada kondisi ideal yang ada, maka pada tahun 2010 perbandingan antara komputer, jumlah pegawai dan jumlah printer adalah 1 : 20 : 2. Artinya Setiap komputer melayani lebih dari 20 pegawai, dan setiap

printer dapat diakses oleh 2 komputer yang ada. Dari perbandingan ini terlihat bahwa kondisi pemenuhan kebutuhan TI pada saat itu masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

Sedangkan pada tahun 2015, jumlah pegawai yang tidak mengalami penambahan, bahkan menurun dikarenakan adanya moratorium di lingkup pemerintahan kota Banda Aceh yaitu sebanyak 7.080 pegawai. Untuk pegawai dengan jumlah tersebut terdapat 1.155 komputer dan 628 printer. Dengan demikian perbandingan yang bisa didapat adalah 1:6:2, dimana setiap komputer dapat dioperasikan oleh 6 pegawai, dan setiap printer akan dapat diakses oleh 2 komputer.

Dari kedua perbandingan antara jumlah pegawai dan jumlah komputer pada kedua tahun tersebut terlihat adanya perkembangan yang cukup pesat sekitar 70% peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan kondisi ideal, pemenuhan perangkat TI masih kurang 50% mencapai perbandingan 1:3. Dari hasil perhitungan ini, kondisi 50% mencapai kondisi ideal seharusnya sudah terlaksana pada tahun 2010, sedang untuk tahun 2014 hanya 10% lagi untuk mencapai kondisi ideal. Dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan pemenuhan kebutuhan perangkat TI namun masih jauh dari kondisi ideal.

Item	Jumlah Perangkat TI	
	2010	2015
PC / Notebook	420	1155
Plotter	2	2
Printer	228	628
Server	16	68
UPS	33	396

Tabel 4. Perbandingan jumlah beberapa perangkat TI tahun 2010 dan 2015

C. Suprastruktur

Evaluasi suprastruktur dilaksanakan dengan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara umum, hasil evaluasi suprastruktur mencapai 53.85%, dimana 30% diantaranya berasal dari pelaksanaan pelatihan yang berkaitan dengan TIK, yang dilaksanakan oleh Banda Aceh Academy (BAA). Sebagian dari perencanaan yang tidak terlaksana dapat dikaitkan dengan ketiadaan kebijakan pendukung. Sebagai contoh status Municipality Information Management System (MIMS) yang saat ini berada di bawah Setda bidang Pembangunan. Pada perencanaan ini terdapat 2 poin yang menegaskan status MIMS, yaitu perencanaan pembakuan fungsi Dishubkominfo dan MIMS dan perubahan status MIMS menjadi unit struktural.

Poin-poin yang menjadi item dalam perencanaan suprastruktur secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan dasar komputer untuk pegawai dan eksekutif

Pelatihan dasar komputer dan internet dasar telah dilaksanakan diantaranya pada tahun 2012 oleh Banda Aceh Academy (BAA).

2. Pelatihan dasar office automation untuk pegawai dan eksekutif

Salah satu bentuk aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai office automation adalah e-surat. Ketika meluncurkan suatu aplikasi, maka akan selalu diadakan pelatihan untuk penggunaan aplikasi tersebut oleh SKPK terkait, begitu pula dengan e-surat yang pelatihannya diadakan pada tahun 2013. Dengan demikian item pelatihan dasar office automation dianggap telah berjalan.

3. Pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa setiap akan meluncurkan aplikasi yang baru, maka bersama itu pula akan dibuat pelatihan untuk penggunaan aplikasi tersebut. Beberapa bentuk pelatihan ini diantaranya adalah pelatihan aplikasi SIMPEG pada tahun 2010, dan diklat teknis pemanfaatan database pada tahun 2013.

4. Pelatihan administrator perangkat keras

Tidak terlaksana.

5. Pelatihan pengenalan jabatan fungsional pranata komputer dan perekayasa

Telah berjalan dalam bentuk pengiriman peserta dalam acara Diklat di Jakarta pada tahun 2012.

6. Pengembangan kerjasama dengan institusi pendidikan

Tidak terlaksana, meskipun sebelumnya pernah menjajaki kerjasama dengan Politeknik Aceh untuk pembuatan software e-kinerja, namun tidak pernah sampai ke tahap penandatanganan MoU antar kedua institusi.

7. Migrasi ke software legal Open Source / proprietary

Migrasi ke Open Source telah dilaksanakan, namun tidak terdata sejauh mana migrasi ini telah dilaksanakan. Sosialisasi dan pelatihan Open Source Software telah dilaksanakan pada tahun 2011

8. Pembakuan fungsi Dishubkominfo dan MIMS

Tidak terlaksana.

9. Perubahan MIMS menjadi Unit Struktural

Tidak terlaksana.

10. Peningkatan jumlah pegawai Dinas Kominfo

Selama kurun waktu dari 2010 hingga 2014, terdapat penambahan 4 pegawai non PNS di Dinas Kominfo yang terlaksana dalam 2 tahap pada tahun 2013 dan 2014, dengan rincian 2 orang tenaga pemrograman dan 2 orang tenaga bidang jaringan. Hal ini masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan dimana ada beberapa bidang lain yang diharapkan ada tapi belum direkrut.

11. Pembuatan SOP dan Dasar Hukum e-government

Tidak terlaksana.

12. Pembentukan CIO

Tidak terlaksana. Meskipun telah dibentuk komite TIK pada tahun 2013 namun dinilai kurang efektif karena perbedaan peran antar keduanya.

13. Evaluasi pengendalian Intern (Tata Kelola TIK)

Tidak terlaksana. Evaluasi yang dimaksud oleh dokumen ITMP ini adalah evaluasi terhadap penerapan atau implementasi dari ITMP secara berkala menggunakan kuesioner TIK yang dikembangkan oleh DETIKNAS. Namun kuesioner yang disebutkan terdapat pada lampiran tersebut nyatanya tidak dilampirkan dalam dokumen ITMP 2010-2014 sehingga tidak dapat digunakan.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Secara umum, perkembangan pengelolaan TIK dalam lingkup pemerintah kota Banda Aceh mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan kondisi awal pada saat perancangan dokumen ITMP ini. Hal ini misalnya ditandai dengan banyaknya peningkatan dari segi jumlah aplikasi yang telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun internal SKPK, dari segi jumlah perangkat TIK yang ada, dan juga dari segi luas cakupan jaringan antar SKPK di Banda Aceh.

Namun terlepas dari itu, masih banyak juga item dari perencanaan yang telah dibuat dan dimuat dalam dokumen ITMP yang belum terlaksana dari aspek infrastruktur dan suprastruktur. Item-item yang belum terlaksana tersebut terutama terkait dengan kebijakan dan kerjasama dengan institusi pendidikan.

Menilik dari prosentase keberhasilan implementasi dari setiap aspek perencanaan, maka dapat dilihat bahwa aspek infostruktur memiliki tingkat implementasi tertinggi sebesar 81.82%, diikuti oleh infrastruktur dengan tingkat implementasi sebesar 54.55%, dan suprastruktur dengan tingkat implementasi sebesar 46.15%. Jika dirata-ratakan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat implementasi dari perencanaan ITMP 2010-2014 dapat digolongkan dalam kategori SEDANG.

3.2 Rekomendasi

Ada berbagai faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab dari terhambatnya implementasi dari perencanaan yang telah dibuat dalam dokumen ITMP. Kelemahan-kelemahan tersebut yang perlu diantisipasi dan dicarikan solusinya agar dokumen perencanaan IT Master Plan berikutnya dapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal untuk kemajuan Kota Banda Aceh dan mewujudkan visi menuju Banda Aceh cyber city.

Hal-hal yang mungkin dapat menjadi penyebab lemahnya implementasi ITMP sekaligus item dari perencanaan yang dianggap penting dimasukkan sebagai rekomendasi dalam laporan evaluasi ini sehingga dapat menjadi prioritas dalam perencanaan dan implementasi ITMP berikutnya. Hal-hal yang menjadi rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan CIO

Government Chief Information Officer (CIO) penting dibentuk untuk menjamin pengelolaan TIK di institusi. Diantara peran dari Government Chief of Information Officer antara lain adalah sebagai berikut:

- ✓ Menciptakan sinergi yang optimal antara proses-proses pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dengan sistem-sistem informasi dan aplikasi komputer yang ada.
- ✓ Merumuskan visi TI yang diselaraskan dengan visi dan tujuan organisasi
- ✓ Mengkomunikasikannya ke seluruh stakeholders
- ✓ Merencanakan dan menyiapkan rancangan tatakelola TI (IT governance) yang akan menjadi basis bagi manajemen aktivitas-aktivitas berbasis TI
- ✓ Menjamin optimalitas pemanfaatan TI di organisasi
- ✓ Melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di institusinya

2. Hukum/Kebijakan tentang Tata kelola TIK

Kebijakan-kebijakan tentang penata-kelolaan TIK diperlukan sebagai payung hukum untuk kegiatan-kegiatan pengembangan TIK di Banda Aceh. Dengan lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut juga diharapkan menjadi pendorong dan sebagai pedoman dasar dalam pengembangan e-government yang lebih terarah, terstruktur dan sistematis dalam lingkup pemerintah Kota Banda Aceh. Kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen ITMP 2010-2014 merupakan kebijakan dasar yang perlu mendapat prioritas untuk penerbitannya pada periode mendatang.

3. Sistem tata kelola TI satu pintu

Hal ini penting dilaksanakan agar tidak terjadinya dualisme dan saling lempar tanggung jawab dalam pengelolaan TIK di Banda Aceh, dimana nantinya hanya ada satu lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk kemajuan dan pengembangan TI di Banda Aceh. Hal ini juga telah dimasukkan dalam item perencanaan ITMP 2010-2014 pada rencana pengembangan suprastruktur berupa “pembakuan fungsi dishubkominfo dan MIMS” sebagai yang bertanggung jawab penuh untuk pengembangan TIK di Banda Aceh dan pada saatnya mengintegrasikan MIMS sebagai badan dibawah Dishubkominfo.

Lembaga ini nantinya juga dapat berfungsi sebagai “Data Center dan Data Management/recovery Center” dimana salah satu fungsinya adalah menjembatani kebutuhan dan pengadaan data yang dapat dipakai bersama antar seluruh SKPK.

4. Pembentukan Data Center sebagai pusat repositori data, yang berada dibawah naungan sistem satu pintu tata kelola TIK

Pembentukan data center ini penting dilakukan sebagai pusat sharing dan pengelolaan data-data pembangunan yang dapat dipakai oleh semua SKPK yang membutuhkan dengan waktu yang lebih cepat. Data center ini juga diperlukan untuk membuat e-Government Message Bus yang dapat dipakai sebagai Digital Dashboard untuk eksekutif, sehingga pada akhirnya akan mempercepat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Pemko Banda Aceh.

Disamping adanya data center ini juga diperlukan akan adanya back up data dengan lokasi yang jauh dari data center ini yang dapat berfungsi sebagai cadangan ketika data yang ada di data center ini tidak berfungsi.

IV. Lampiran

4.1. Implementasi Rencana Pengembangan Sistem Informasi

Rencana Pengembangan Sistem Informasi			Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Tahun 5				Ada	Pemilik	Pengelola
SKPK Pemilik	SKPK Pengelola	Sistem Informasi	2010				2011				2012				2013				2014						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Bag. Humas	Dishubkominfo	1 Portal Pemda	1																				1	1	0
Disdukcapil	Dishubkominfo	2 SI Kependudukan & Ketenagakerjaan		1	1	1																	1	1	0
KPPTSP	Dishubkominfo	3 SI Pelayanan Umum Terpadu (SIMSATU)	1	1	1																		1	1	0
Dishubkominfo	Dishubkominfo	4 SI Eksekutif		1																			0	0	0
DPKAD	DPKAD	5 SI Keuangan Daerah	1	1	1																		1	1	1
Bappeda	Bappeda	6 SI Perencanaan Daerah		1	1	1																	1	1	1
KPDA	Dishubkominfo	7 SI Tata Naskah		1																			1	0	0
KPDA	Dishubkominfo	8 SI Arsip			1																		1	0	0
Dinsosnaker	Dinsosnaker	9 SI JPS					1																1	0	0
Dinkes	Dinkes	10 SI Kesehatan					1	1	1														1	1	1
Disdikpora	Disdikpora	11 SI Pendidikan						1	1	1													1	1	1
Disperindagkop UKM	Disperindagkop UKM	12 SI Industri & Perdagangan (inc. ind. Kecil & Menengah)					1	1															1	1	0
Inspektorat	Inspektorat	13 SI Pengawasan Daerah					1																1	1	1
Bappeda	Dishubkominfo	14 SI Tata ruang (GIS)						1	1	1													1	1	0
Dishubkominfo	Dishubkominfo	15 SI Perhubungan								1	1	1											1	1	1
DPKAD	DPKAD	16 SI Pengelolaan Pendapatan Daerah									1	1											1	1	1
DPKAD	DPKAD	17 SI Sistem Kas & Perbendaharaan											1										1	1	1
KLH	KLH	18 SI Lingkungan Hidup & Sarana Umum											1	1									1	1	1
KPDA	KPDA	19 SI Perpustakaan																					1	1	1
Dishubkominfo	Dishubkominfo	20 SI Potensi Daerah																					0	0	0
Bag. Hukum	Dishubkominfo	21 SI Pengelolaan Hukum & Perundang-undangan																					1	1	0
DKPP	DKPP	22 SI Perikanan & Kelautan											1	1									1	1	1
DKPP	DKPP	23 SI Pertanian														1	1	1					1	1	1

DKPP	DKPP	24 SI Pengairan																			0	0	0
BKPP	Dishubkominfo	25 SI Kepegawaian																			1	1	0
Disbudpar	Disbudpar	26 SI Pariwisata																			1	1	1
Bag. Ekonomi	Bag. Ekonomi	27 SI Pengelolaan Perusahaan Daerah																			0	0	0
DPKAD	DPKAD	28 SI Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah																			1	1	1
Bag. Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	29 SI Penyelenggaraan Pemerintahan																			1	1	1
Dishubkominfo	Dishubkominfo	30 Office Automation																			1	1	1
Kesbangpolinmas	Dishubkominfo	31 SI Ketentraman dan Ketertiban																			0	0	0
DPRK	DPRK	32 Sistem Administrasi DPRK																			1	0	1
		33 Open Source E-Government Message Bus																			0	0	0
Total																					27	23	17

4.2. Implementasi Rencana Pengembangan Infrastruktur

No	Kegiatan	Tahun ke :					Status
		I - 2010	II – 2011	III – 2012	IV – 2013	V – 2014	
1	Optimalisasi Tata kelola TI di Pemko Banda Aceh						Terlaksana, namun tidak terstruktur
2	Adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemko Aceh						Tidak Terlaksana
3	Kebijakan TI tentang government Data management center dan government data recovery center						Tidak Terlaksana
4	Kebijakan pengamanan konten di wilayah Pemkot Banda Aceh kepada operator yang melayani pemerintah dan masyarakat Banda Aceh, sehubungan dengan akan dijadikannya kota Banda Aceh sebagai kota wisata islami dan kota pendidikan						Tidak Terlaksana
5	Kebijakan dan implementasi integrasi data untuk layanan masyarakat dan pelaporan eksekutif						Tidak Terlaksana
6	Pembangunan, migrasi dan pengembangan government data management center						Tidak Terlaksana
7	Pengembangan Jaringan WAN dengan MPLS						Terlaksana
8	Pengembangan LAN di setiap SKPD						Terlaksana
9	Pembangunan Pemko Banda Aceh Backbone dengan BWA						Terlaksana
10	Evaluasi dan update ITMP						Sedang Berjalan
11	Pemenuhan kebutuhan perangkat IT di seluruh SKPD Pemko Banda Aceh	50 %	60%	70%	80%	90%	Terlaksana
→ Kondisi ideal -->							

4.3. Implementasi Rencana Pengembangan Suprastruktur

No.	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	Status	Ket
1	Pelatihan dasar komputer untuk pegawai dan eksekutif						Terlaksana	
2	Pelatihan dasar office automation untuk pegawai dan eksekutif						Terlaksana	
3	Pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi	Disesuaikan dengan jadwal pengembangan sistem					Terlaksana	SIMPEG, E-kinerja
4	Pelatihan administrator perangkat keras	Disesuaikan dengan jadwal pengembangan sistem					Tidak Terlaksana	
5	Pelatihan pengenalan jabatan fungsional pranata komputer dan perekayasa						Terlaksana	Diklat di Jakarta
6	Pengembangan kerjasama dengan institusi pendidikan						Tidak Terlaksana	
7	Migrasi ke software legal open source/proprietary		Sosialisasi dan pelatihan				Terlaksana	Contohnya pada server
8	Pembakuan fungsi Dishubkominfo dan MIMS						Tidak Terlaksana	
9	Perubahan MIMS menjadi sub unit struktural						Tidak Terlaksana	
10	Peningkatan jumlah pegawai dinas kominfo						Terlaksana	Jaringan : 2 Programmer : 2
11	Pembuatan SOP dan dasar hukum e-government						Tidak Terlaksana	
12	Pembentukan CIO						Tidak Terlaksana	Terbentuknya Komite TIK
13	Evaluasi pengendalian intern (Tata Kelola TIK)	Disesuaikan dengan jadwal pengembangan sistem					Tidak Terlaksana	